

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **2.1. Sejarah Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (disingkat ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. ATR/BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum digabung dalam satu lembaga kementerian yang bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan yang tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketinggian Kantah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Kantor Pertanahan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota salah satunya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten

Pesawaran yang masuk ke dalam Kantor Pertanahan di Provinsi Lampung. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran berdiri pada tahun 2008 dan berfungsi untuk menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan, serta Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia pada tingkat Kabupaten di Provinsi Lampung.

## **2.2. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan visi dan misi untuk mendukung pencapaian visi dan misi presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama 5 tahun ke depan (2020-2024) adalah terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan dioperasionalkan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek sosial.
2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

## **2.3. Kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran**



		- Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	1
		➤ Layanan Data dan Informasi	
		- Pengadaan Paket Data Internet	1
		- Pengadaan Lisensi Aplikasi Autocad dan Office	
		- Pengadaan KTP Reader	
		➤ Layanan Bantuan Hukum	1
		- Advokasi	1
		➤ Layanan Perkantoran	
		- Gaji dan Tunjangan	1
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1
		j. Layanan Manajemen SDM Internal	
		➤ Layanan Manajemen SDM	1
		k. Layanan Manajemen Kinerja Internal	1
		➤ Layanan Perencanaan dan Penganggaran	
		- Evaluasi Renstra 2020-2024	
		- Penyusunan RKKAL	1
		- Penyusunan TRPNBP	
		- Penyusunan Revisi DIPA/POK	
		➤ Layanan Pemantauan dan Evaluasi	
		- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1
		- Penyusunan Dokumen SAKIP	1
		➤ Layanan Manajemen Keuangan	1
		- Pembinaan dan Monitoring	1
		- Penyusunan Juknis	
		- Penyusunan LK Tingkat UAKPA/Satuan Kerja	

